

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya populasi manusia yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah yang dibuang. Keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya tempat dan lokasi pembuangan sampah yang layak, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengelolaan dan pembuangan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat sampah, dan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah yang diperketat, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang atau dipandang berharga (Saryomo et al., 2022). Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.

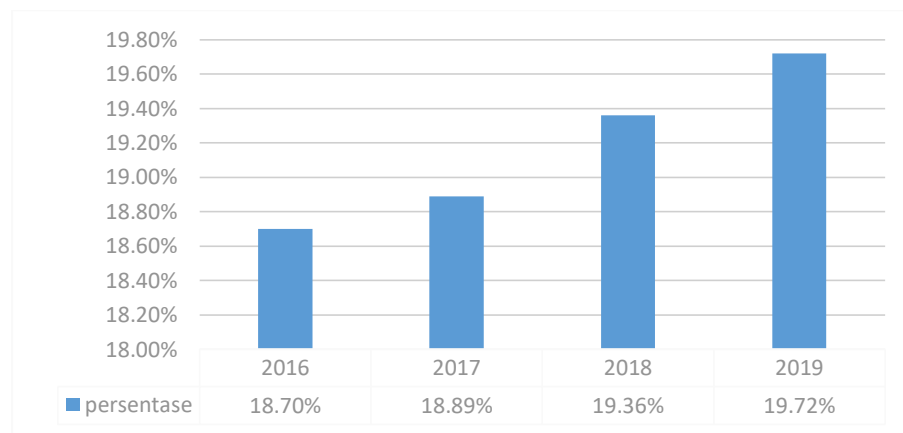
Subekti, 2009 dalam (Alfiandra, 2009) bahwa Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu, sampah dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran penyakit, bau menyengat dan lain-lain sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang paling menjadi sorotan di Indonesia. Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian timbunan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton per tahun yang didominasi dengan sampah organik sebanyak 60% dari total timbunan sampah dan sampah plastik yang berkontribusi sebesar 15% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Ditambah sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang terbilang kurang memadai sehingga menjadikan permasalahan sampah menjadi tidak terselesaikan.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan serius di berbagai tempat di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk yang tidak diimbangi dengan perbaikan serta peningkatan kapasitas sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah telah menyebabkan menumpuknya sampah di berbagai tempat yang tidak semestinya. Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik tersebut dapat menjadi sumber penyakit dan menyebabkan berkurangnya keindahan serta kenyamanan lingkungan di sekitarnya. Ditambah lagi perilaku penduduk di Indonesia yang cenderung konsumtif dan kurangnya kesadaran akan hal tersebut, menjadikan produksi sampah yang terus bertambah tiap waktu. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Pemerintah di dalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak dalam mengambil keputusan. Pemerintah dalam mengambil keputusan jika salah maka, pemerintah sendiri yang akan kewalahan di dalam mengatasi persoalan persampahan. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tentang sampah

adalah Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan jumlah banyak sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut adalah data jumlah Penduduk dan jumlah Potensi volume sampah di Kabupaten Cilacap :



**Diagram 1. 1 Timbulan Sampah di Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2019**

Dari Diagram 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir presentasi jumlah volume sampah mengalami peningkatan volume. Hal ini sejalan dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Persoalan sampah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Persoalan ini sudah lama dan sudah menjadi persoalan yang di hadapi oleh kota-kota besar. Pertumbuhan Populasi dan Peningkatan Sampah di Kabupaten Cilacap menghadapi pertumbuhan populasi yang signifikan, yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Metode pengelolaan sampah tradisional seperti TPA mungkin tidak lagi cukup untuk menangani volume sampah yang semakin meningkat. Tingginya produksi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut menyebabkan Kabupaten Cilacap mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Kendati demikian persolan yang terjadi di Kota Cilacap merupakan persoalan yang di hadapi oleh kota kota besar

yang ada di Indonesia. Namun pemerintah dalam hal itu dinas lingkungan hidup terus berupaya mencari solusi dalam penangan persoalan sampah di Kota Cilacap.

Permasalahan selanjutnya mengenai Keterbatasan infrastruktur dan Sarana untuk pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) seperti fasilitas pemrosesan sampah dan fasilitas pembakaran untuk mengelola jumlah sampah. Berdasarkan berita dari situs <https://bercahayafm.cilacapkab.go.id> (diakses pada tanggal 7 Maret 2024) Saat ini pengelolaan sampah TPST RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap juga menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu di antaranya kurangnya infrastruktur seperti fasilitas pengelolaan sampah, dan persoalan Sarana seperti kurangnya mata pisau scredder yang mulai aus (tumpul) hal ini harus segera dibenahi karena pada mesin pencacah sampah ini mata pisau adalah salah satu komponen yang berfungsi sangat penting, yaitu untuk mencacah plastik-plastik, kurangnya alat berat wheel loader. Lalu, rusaknya bio membran untuk proses pengeringan sampah, serta konstruksi sipil yang mulai mengalami korosi.

Pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) membutuhkan alokasi dana yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan sampah secara efektif. Berdasarkan berita dari situs <https://www.infopublik.id> (diakses pada tanggal 7 Maret 2024) pengolahan sampah RDF (*Refused Drived Fuel*) di TPA Tritih Lor Jeruklegi, diperkirakan menelan anggaran senilai Rp78 miliar. Diperkirakan komponen *mechanical electrical*, yang didukung oleh bangunan sipil tersebut, akan mampu mengolah sampah sebanyak 120 ton per hari. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Cilacap, Sunarno, melalui Sekretaris Dinas Kun Nasyiton menyatakan bahwasannya Sampah sebanyak itu, RDF (*Refused Drived Fuel*) mampu menghasilkan output pengganti bahan bakar batubara mencapai 40 ton. Meski demikian, saat ini Pemkab Cilacap masih terkendala biaya operasional yang cukup besar.

Upaya mengimplementasikan program pengelolaan sampah penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan lembaga terkait lainnya. Penerapan teknologi yang tepat dan pengaturan kebijakan yang mendukung juga penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Berdasarkan situs berita <http://perpustakaan.menlhk.go.id> (diakses pada 8 Maret 2024) Tantangan pada Pengelolaan Sampah RDF di Kabupaten Cilacap mulai dari menentukan pengelola berupa kelembagaan maupun sumberdaya pengisi lembaga-lembaga itu hingga kini masih belum jelas. Bicara hal sensitif terkait harga produk RDF. Dalam satu hari pengolahan 120 ton sampah itu diperkirakan menghasilkan 30 – 40 ton RDF. Ini hanya sebagian kecil dari total kebutuhan batubara harian Holcim di Cilacap. Meski penggunaan RDF ini kurang dari 10 persen dari total kebutuhan batubara, Holcim tetap menginginkan harga pembelian di bawah harga batubara. Sedangkan pemerintah yang bisa dikatakan sebagai pihak penjual menginginkan harga kompetitif. Nilai kalor RDF berkisar 2.800 kilokalori per kilogram atau lebih rendah dari batubara yang digunakan pabrik semen sekitar 4.000 kilokalori per kilogram. Harga beli batubara yang fluktuatif dan berubah-ubah ini pun memengaruhi pertimbangan pembelian. Menurut Ian Rowland dari Technical Advisor dari ESP3, apabila harga

batubara turun, para pengampu kepentingan agar memberikan subsidi sehingga harga RDF kompetitif.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan di atas, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Cilacap sangat berharap bahwa RDF (Refuse Derived Fuel) adalah sebuah kebijakan publik yang tepat untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, karena program pengelolaan sampah dengan sistem dengan sistem *open dumping*, sanitary landfill dan konsep 3 R (*Refuse, Reduse, Recycle*) belum secara efektif mengatasi masalah sampah di Kabupaten Cilacap. Dalam kondisi yang demikian, potensi pengelolaan sampah RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*) di Kabupaten Cilacap masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan sampah RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*) agar dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (dalam Putra, 2017). Program strategi pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, upaya penanganan tersebut berupa pengolahan sampah dengan Penerapan Teknologi dengan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*).

Penerapan program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap akan sejalan dengan tujuan kebijakan

Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki cara pandang yang berbeda tentang sistem pengelolaan sampah. Dengan potensi penambahan sampah kota yang kian meningkat, Pemkab Cilacap membangun sebuah sistem pengelolaan sampah kota untuk dijadikan bahan bakar pengganti batu bara untuk industri semen. Hal ini yang memicu Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengubah permasalahan sampah untuk dijadikan alternatif bahan bakar untuk industri semen bernama RDF (*Refuse Derived Fuel*).

Program Pengelolaan Sampah mencakup proses merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan sampah dari sumbernya hingga akhirnya diolah dan dibuang. Administrasi Publik sepenuhnya terkait dengan tata kelola dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Keterkaitan antara kebijakan publik pengelolaan sampah dengan administrasi publik terletak pada bagaimana pemerintahan dan institusi terkait dapat mengelola dan memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah yang tepat, baik dari segi kebijakan, regulasi, peran serta tanggungjawab, hingga alokasi sumber daya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan adanya Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ini dapat dilihat mengapa target pengelolaan sampah terpadu berbais rdf (*refused derived fuel*) belum sesuai dengan Peraturan Bupati No.233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah

Tangga di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap?”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka identifikasi masalah dalam Penelitian ini , antara lain :

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan volume sampah di Kabupaten Cilacap.
2. Minimnya peralatan Pendukung pada pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap.
4. Keterbatasan infrastruktur untuk pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) seperti fasilitas pemrosesan sampah dan fasilitas Pengelola sampah.
5. Harga Produk RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang fluktuatif dan berubah-ubah sesuai jenis kalorinya.



### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja faktor yang terkait pada Implementasi Program Penerapan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu keinginan yang ingin dicapai setelah kegiatan penelitian dilaksanakan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan faktor-faktor terkait penerpaan implementasi program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi program dan dapat dijadikan bahan dalam peningkatan dan perbaikan Pemerintah Kabupaten Cilacap bahwa RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah sebuah program yang tepat untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Peneliti berdasarkan hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan sehingga materi yang dipaparkan di dalam penelitian ini didasari oleh materi yang diajarkan di dalam perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian

#### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi akademis atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai implementasi program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) dari sampah pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Cilacap.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini bagi pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait implementasi program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) dari sampah penbuangan akhir (TPA) di Kabupaten Cilacap.

## 1.5 Kerangka Teori

**Tabel 1. 1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Juriko Abdussamad, dkk (2022)	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango	Mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.	Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber

				<p>daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.</p>
2.	Lina Nur lina, dkk (2021).	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten	Implementasi kebijakan publik pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi

		Sampah Soreang)	Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)	dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok
--	--	-----------------	---	---

				target dan dunia usaha.
3.	Teguh Imam Fitriani (2018).	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di kabupaten lamongan	Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan program yang terintegrasi. Komunikasi ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
4.	Renaldi Naufal Abbiyu, dkk (2023).	Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah	Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah ini belum tepat kebijakan, tepat target, dan tepat proses. Faktor yang dianggap menghambat implementasi kebijakan penanganan sampah yaitu sumber daya, struktur dan sasaran, kondisi sosial, ekonomi dan

			Penanganan Sampah) dengan teori 5 ketepatan menurut Riant Nugroho, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat melalui teori Van Meter dan Van Horn.	politik.
5.	Paramita Adhinul Putera (2016).	Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung hams segera menyusun dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.</li> <li>2. Aspek Interpretasi Dinas PU dan Perhubungan perlu</li> </ol>

				<p>mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus.</p> <p>3. Aspek Aplikasi Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.</p>
6.	Tri Yudianto, dkk (2021).	Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan	Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik yang berpedoman pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang



			mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blora.	pengelolaan sampah, yang dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B atau memuaskan.
7.	Khairunnisa Indriati (2023).	Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam mengatasi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah mamaksimalkan pengelolaan sampah namun masih belum optimal ditandai dengan indikator menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang belum terpenuhi.

			hambatan pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru	
8.	Ratna Arsinandi, dkk (2019).	Implikasi kebijakan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabuapten cirebon	Mengetahui Implementasi Kebijakan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan	Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (studi kasus Tempat Penampungan Sampah Terminal Weru) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dimensi komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

			Hidup Kabupaten Cirebon.	
9.	Agoeng Prasetya, (2023).	Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sesuai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015.	Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum optimal dalam mengatasi masalah sampah, tingkat pengelolaan sampah masih rendah dan masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik terutama masalah sampah rumah tangga. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung antara lain; kurangnya edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, sumberdaya yang belum optimal dan kurang komitmen pemerintah. Namun ada faktor pendukung yang berkontribusi yaitu adanya kelompok pengelolaan sampah.
10.	Resyi Nurfalih, (2023).	Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh	Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah

		pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis	menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis	oleh pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum belum berjalan optimal. Hambatan- hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya komitmen, belum memadainya kemampuan aparatur pemerintah, kurangnya kesungguhan dan belum memadainya anggaran. Upaya- upaya yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi, memberikan pemahaman dan penjelasan pengelolaan sampah dan mencari sumber-sumber anggaran.
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada fokus, lokus dan hasil penelitian. Fokus yang ada pada penelitian diatas banyak mengarah kepada implemtasi kebijakan publik dan tidak berfokus pada Implementasi program. Lokasi penelitian yang ada pada penelitian terdahulu pun tidak ada yang satu lokasi dengan penelitian penulis yaitu Cilacap. Hasil penelitian yang ada pada penelitin terdahulu hanya menjelaskan tentang berhasilnya atau tidak pengelolaan sampah tetapi pada penelitian penulis hasilnya dijelaskan dan

berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 233 Tahun 2018 dan Rencana Strategis Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

## **1.6 Kajian Teori**

### **1.6.1 Administrasi Publik**

Nicholas Henry (1988:26) mengemukakan “*Public Administration is a broad-anging and amorphous combination of theory and practice its purpose is to promote a superior understanding of government and its relationship with the society, it governs, as well as to encourage public policies more responsive to social needs and to institute managerial practices attend to effectiveness, efficiency and the deeper human requisites of the citizenry*”. (Administrasi Publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien).

Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Dan Menurut Dwight Waldo Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Amani et al., 2013).

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Perkembangan ilmu administrasi memiliki ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup atau cakupan administrasi Negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi Negara maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktisi administrasi Negara yang populer dan dapat dijadikan dasar. Harus diakui cakupan atau ruang lingkup administrasi Negara sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik dari suatu Negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga-lembaga departemen dan non departemen yang ada (Meutia, 2018).

John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Beddy Iriawan Maksudi (2017:226), dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer* mendefinisikan Administrasi Publik sebagai berikut. “Administrasi publik adalah suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur negara/pemerintah di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik”.

### **1.6.2 Perkembangan Paradigma**

Henry (dalam Keban, 2008:31-33) dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara.

1. Paradigma I : Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926), disebut juga sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Tokoh-tokoh yang mendukung paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonardo D. White. Pemisahan antara politik dan administrasi diwujudkan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal

ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan. Dengan demikian, paradigma ini menekankan bahwa adanya pemisahan antara politik dan administrasi, yaitu dimana politik merupakan sebagai badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dalam bentuk kebijakan, dan administrasi sebagai badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak dari badan legislatif tersebut. Lokus dalam paradigma ini ialah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokus dalam paradigma ini abstrak karena kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937), Diawali dengan terbitnya *Principles of Public Administration* karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick&Urwick yang dipengaruhi oleh tokoh manajemen klasik Henry Fayol. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgetting*) sebagai fokus administrasi publik. Dalam paradigma ini lokus tidak pernah diungkap secara jelas sehingga fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.



3. Paradigma III: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970), Prinsip Manajemen Menurut HERBERT SIMON (*The Poverb Administration*) ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “*Public*” dari “*public Administration*” menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark (*Element Of Public Administration* yang kemudian kembali Mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Fase paradigma ketiga ini berusaha menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Terjadi pertentangan anggapan terkait administrasi bebas nilai dengan administrasi tidak bebas nilai. Dalam praktek ternyata anggapan bahwa administrasi tidak bebas nilai lah yang berlaku dimana teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik yang lokusnya birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi kabur.
4. Paradigma IV: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970), Adalah masa administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam seperti perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Pada masa ini terdapat dua jenis administrasi negara

yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang berdasarkan pengaruh psikologi sosial dan ilmu administrasi yang menjelaskan mengenai *public policy*. Istilah *Administrative Science* digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada focus tetapi tidak pada locusnya. Fokus di dalam paradigma ini mengarah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya.

5. Paradigma V : Paradigma yang disebut sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang). Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Administrasi negara telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik. Setiap unsur aparatur negara termasuk birokrasi di dalamnya, apapun posisinya dari staf hingga jabatan tertinggi, memiliki peran dalam proses kebijakan publik sesuai batas kewenangannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab aparatur negara atau administrator negara dalam proses kebijakan publik menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya posisi dan jenjang jabatan pemerintahan yang diembannya.

6. Paradigma VI : Merupakan paradigma *Governance* (1990- Sekarang). Paradigma keenam menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. *Good governance* mulai di kenal secara dalam pada tahun 1990-an sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan dan dipandang sebagai paradig baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antar pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. *Governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (Negara/pemerintahan), *privat sector* (sector swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Hal inilah yang kemudian membedakan antara paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penjelasan mengenai paradigma administrasi publik, dalam penelitian ini mengarah pada paradigma ke-6 atau paradigma terakhir. Paradigma ke-6 telah memiliki fokus dan lokus yang jelas dari administrasi publik. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi

kebijakan pengelolaan sampah RDF yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan faktor pendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Penerapan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap sebagai upaya pembangunan berkelanjutan, sedangkan lokusnya ialah Kabupaten Cilacap khususnya pada TPST RDF Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap.

### **1.6.3 Kebijakan Publik**

#### **A. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu dan untuk melakukan kegiatan tertentu, agar tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa (Agustian, 2019).

Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, berpendapat bahwa secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip oleh Winarno

(2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”. segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Kemudian lebih spesifik dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-masing.

#### B. Sifat Kebijakan Publik

Winarno (2016:23) menjelaskan bahwa sifat kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan), *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan), *Policy Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan), *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan), dan *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan).

Pertama ; *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan) adalah suatu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil suatu tindakan tertentu.

Kedua ; *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan) adalah suatu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah kebijakan publik, seperti undang-undang dan beberapa peraturan-peraturan yang dibutuhkan. Ketiga; *Policy*

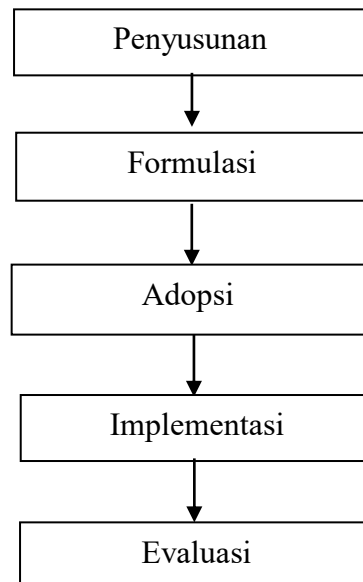
*Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah pernyataan-pernyataan resmi tentang kebijakan publik, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang menunjukkan suatu maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat ; *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan) adalah suatu hal yang sebenarnya yang dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan suatu kebijakan. Dan kelima; *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan) adalah suatu akibat yang diperoleh masyarakat, baik akibat tersebut yang diinginkan maupun tidak diinginkan dari suatu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Pemaparan terkait sifat kebijakan publik tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang baik haruslah memiliki sifat-sifat tersebut, diantaranya *Policy Demands* (tuntutan-tuntutan kebijakan), *Policy Decisions* (keputusan-keputusan kebijakan), *Policy Statements* (pernyataan-pernyataan kebijakan), *Policy Outputs* (hasil-hasil kebijakan), dan *Policy Outcomes* (dampak-dampak kebijakan). Sebuah kebijakan publik itu dijalankan maka salah satu dari kelima sifat tersebut haruslah ada, dan tentunya setiap sifat kebijakan publik yang dimaksud tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh setiap aktor yang terkait dari suatu kebijakan publik yang ada.

### C. Tahap-tahap kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena

itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan publik adalah :



Gambar 1. 1 Tahap – tahap Kebijakan Publik

Penjelasan dari gambar diatas adalah, Pertama ; penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Kedua ; dalam tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah

masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut.

Ketiga ; dalam tahap adopsi kebijakan ini dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Keempat ; dalam tahap implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. Dan kelima ; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut.

#### **1.6.4 Implementasi Kebijakan**

##### **A. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Budi Winarno (2011:147) Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang kongret atau nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.



Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Riant Nugroho (2011:618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Winarno (2016:133) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak yang terjadi dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh banyak aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tujuan-tujuan dari suatu kebijakan atau program-program dapat tercapai.

Terdapat satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan publik yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2012 : 650). Prinsip-prinsip dasar tersebut terbagi kedalam lima ketepatan, yaitu :

### 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam suatu program dapat diartikan sebuah tolak ukur bagaimana suatu program kebijakan tersebut dinilai apakah memang benar-benar diperlukan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

### 2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana berkaitan dengan tiga institusi yang bisa berperan sebagai pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan swasta, atau implementasi program kebijakan yang bersifat monopoli.

### 3. Ketepatan Target

Ketepatan target yang dimaksud disini terbagi ke dalam 2 sisi, dilihat dari target apa yang ingin dicapai dan terlaksana atau tidak. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

### 4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategik dalam

masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

#### 5. Ketepatan Proses

Aspek terakhir dalam melihat efektivitas adalah ketepatan proses. Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian, tepat proses merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sesuai dengan proses yang sudah ditentukan.

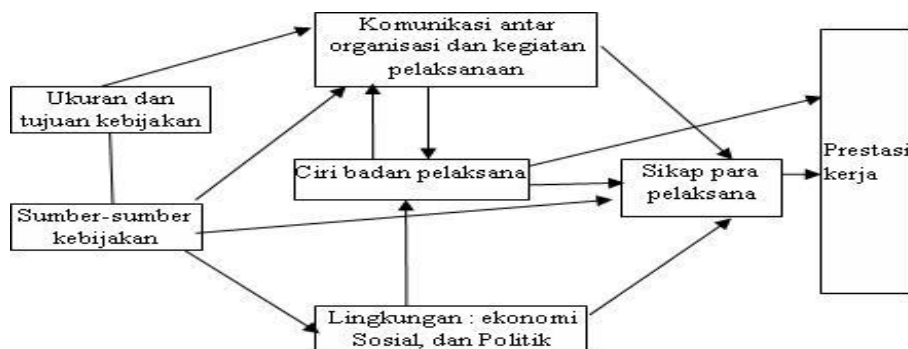
#### B. Model Implementasi Kebijakan

Pengertian dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan ketika dilakukan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tentang cara implementasi kebijakan dilangsungkan, sehingga muncul beberapa cara atau model implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah:

##### 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Nugroho (2009:219) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan yang digunakan adalah pengembangan dari model implementasi klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan proses kebijakan. Adapun beberapa variabel yang ada dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah adanya sumber daya dan tujuan standar.

Dua variabel tersebut bertujuan untuk mendorong komunikasi antar organisasi dan penegak aktivitas atau pelaksana dari suatu kebijakan tersebut, mengetahui mana saja badan-badan yang bertugas mengimplementasikan beserta karakteristiknya. Tujuan yang dimaksudkan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sehingga dapat diketahui model yang tepat dalam pengimplementasian agar dapat tercapai kinerja kebijakan yang dimaksudkan. Adapun lebih jelasnya adalah gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2 Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn

*Sumber : Nugrogo (2009:220)*

Suatu model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:158-168) bahwa tidak hanya menentukan variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan adalah tujuan keputusan kebijakan

secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

- b. Sumber Daya : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana : Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

- d. Kecenderungan Pelaksana (*Implementor*) : Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.
- e. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan : Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan dan sulit.

- f. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik : Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak dari kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

## 2. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Merilee S. Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2009:221) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Adapun yang dimaksud dalam hal isi yaitu yang terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh

kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Sedangkan yang dimaksud dalam hal konteks dalam model implementasi kebijakan Grindle, yaitu adanya tiga variabel penting yang harus diperhatikan. Pertama; kekuatan dalam kepentingan aktor yang terlibat, kedua; karakter institusi dan penguasa, ketiga; tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Model implementasi kebijakan Grindle ini lebih menekankan pada konteks kebijakan, khususnya yang terkait dengan implementor (aktor yang melakukan implementasi), sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### 3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

George Edward III dalam Nugroho (2009:225) mencatat bahwa isu kebijakan publik terjadi karena kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Sehingga Edward dalam Nugroho (2009:512) menyarankan untuk memberi perhatian kepada empat isu utama yaitu :

#### a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Edward beranggapan bahwa



persyaratan pertama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah kebijakan tersebut harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Hambatan yang ditemukan dalam transmisi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Winarno (2016:184) menyebutkan bahwa sumber daya yang dimaksud meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas, berikut penjelasannya :

1) Staff

Staf merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa

jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Karena jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan implementasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang penting dalam suatu implementasi.

## 2) Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan informasi sebagai suatu data. Informasi sebagai pelaksana suatu kebijakan maksudnya adalah perlunya mengetahui yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah sebagai data maksudnya adalah data tentang ketataan aktor-aktor yang terlibat terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.

### 3) Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting dalam implementasi. Setiap wewenang bersifat berbeda tergantung program yang diselenggarakan. Namun, dalam beberapa hal dalam suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

### 4) Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas fisik yang dianggap sebagai salah satu sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

### c. Disposisi

Disposisi sikap adalah tentang bagaimana pejabat berbuat dalam memutuskan sesuatu. Selain itu disposisi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap

baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka tujuan awal dari suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Implementasi suatu kebijakan ini bukan hanya kecenderungan sikap dari pemerintah atau birokrat saja yang diperhatikan. Namun aktor lain seperti pihak swasta dan masyarakat juga memiliki kecenderungan sikap yang perlu diperhatikan, hanya saja tidak begitu nampak. Dengan demikian masyarakat yang tidak menyetujui suatu kebijakan tertentu berpotensi terjadi suatu kesalahan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang mutlak ada dalam implementasi kebijakan. Birokrasi terbentuk atas kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan bentuk dari suatu birokrasi tidak selalu dalam hal pemerintahan, namun bisa juga organisasi atau lembaga. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan perlu memiliki cukup keinginan serta sumber daya untuk menggerakkan suatu birokrasi tersebut. Menurut Edwards dalam Winarno (2016:206), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja atau ukuran dasar atau yang biasa disebut dengan *Standart Operational Procedure* (SOP). Prosedur kerja ini biasanya terdapat pada organisasi-organisasi publik maupun swasta. Dengan menggunakan *Standart Operational Procedure* (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, *Standart Operational Procedure* (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang sama.

Fragmentasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang tidak lagi menjadi satu atau bisa disebut sebagai suatu yang saling bertentangan. Artinya dalam hal ini masing-masing bidang dalam suatu birokrasi saling bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan dalam mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan setiap bidang yang melaksanakan program-program yang ada. Kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

### **1.6.5 Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*)**

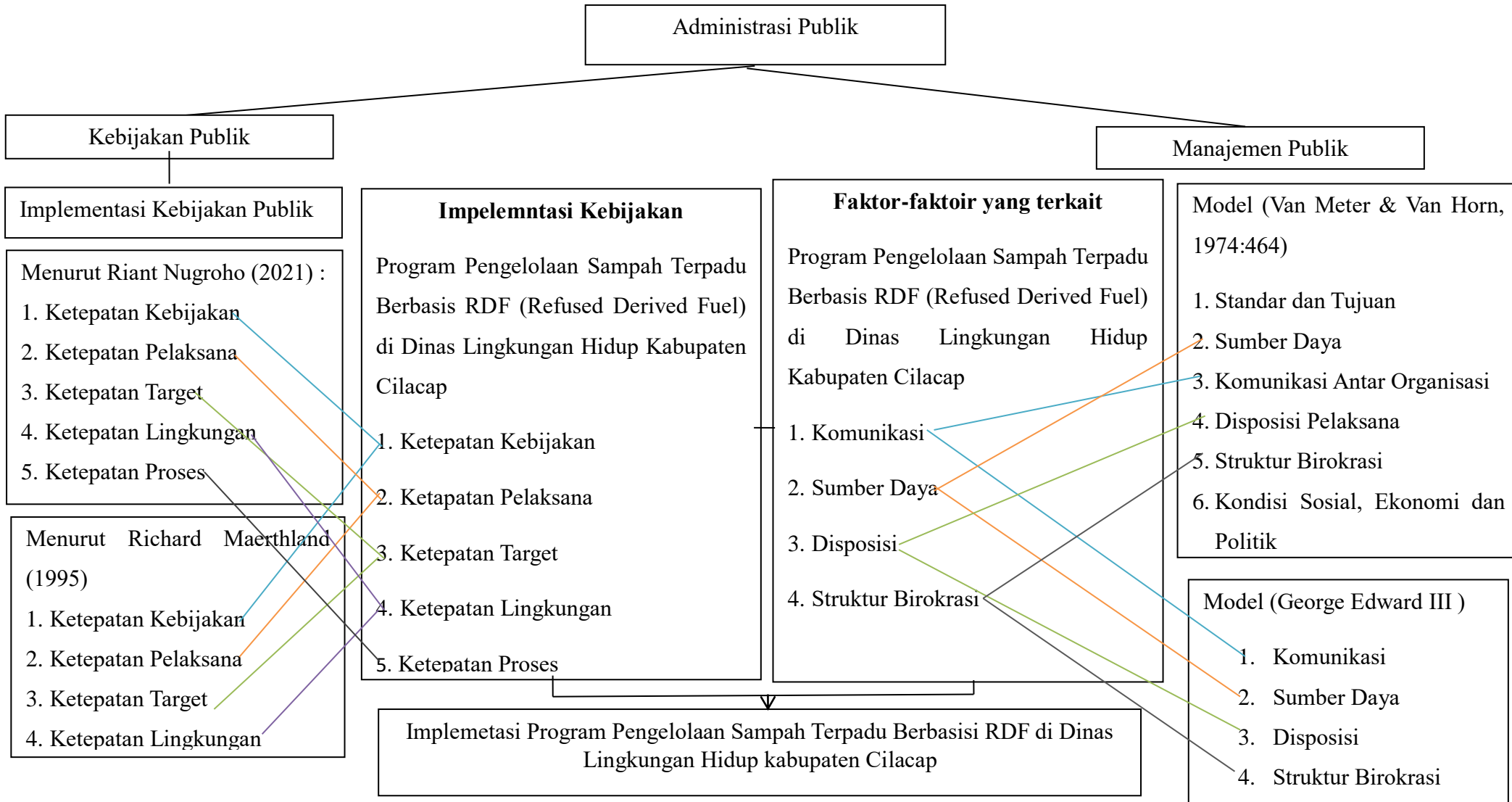
Sudrajat (2007:6) sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah membutuhkan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah (Nagong, 2021).

Irma Natasya Hutabarat (2018, h. 2). RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah sampah yang mudah terbakar dan terpisahkan dari bagian yang sulit terbakar melalui proses pencacahan, pengayakan dan klasifikasi udara.

RDF (*Refuse Derived Fuel*) merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu bahan bakar. RDF (*Refuse Derived Fuel*) dihasilkan dari pemisahan fraksi yang mudah terbakar (*combustible fraction*) dan fraksi sampah yang sulit dibakar (*non combustible fraction*) dari sampah secara mekanik. Untuk menghindari terjadinya kekurangan lahan perlu dilakukan penanganan pada sampah yakni dengan mengubah sampah menjadi sumber energi seperti bahan baku RDF (*Refused Derived Fuel*). RDF (*Refuse Derived Fuel*) merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu bahan bakar. Sistem RDF dibagi menjadi dua yaitu (Kumar, 2016): Pertama, *Shred and burn system* adalah Sistem ini merupakan sistem paling sederhana dimana pengolahan minimal sampah yang belum diproses telah dilakukan seperti penyisihan besi. Selanjutnya sampah dipotong sesuai dengan ukuran partikel yang dipersyaratkan dan dilanjutkan pada proses pembakaran; Kedua, *Simplified process system* adalah Jenis sistem ini dilakukan dengan memisahkan sampah-sampah yang tidak mudah terbakar, dapat didaurulang, dan material besi dari sampah campuran. Selanjutnya sampah dimasukkan pada shredder untuk menghomogenkan ukuran dari sampah tersebut yaitu 10-15 cm.

**1.7 Kerangka Penelitian**





## 1.8 Operasionalisasi Konsep

Fokus dalam Penelitian ini adalah Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap dan mengidentifikasi faktor apa saja yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.

**Tabel 1. 2** Operasionalisasi Konsep

<b>Fenomena</b>	<b>Gejala</b>	<b>Sub Gejala</b>
Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF ( <i>Refuse Derived Fuel</i> ) di Kabupaten Cilacap	Ketepatan Kebijakan	1. Regulasi Program Pengelolaan Sampah RDF 2. Teknologi pengelolaan sampah RDF
	Ketepatan Pelaksana	1. Membangun Koordinasi Pelaksana 2. Perjanjian Kerja sama dengan Kemitraan
	Ketepatan Target	1. Mengurangi Timbunan Sampah 2. Hasil Produk RDF 3. Harga jual RDF
	Ketepatan Lingkungan	1. Lingkungan Internal 2. Lingkungan Eksternal
	Ketepatan Proses	1. Proses Pengoperasian Sampah RDF

Faktor yang terkait dalam Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF ( <i>Refuse Derived Fuel</i> ) di Kabupaten Cilacap	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan dalam komunikasi</li> <li>2. Kejelasan Penyampaian Informasi</li> <li>3. Konsistensi Penyampaian Informasi</li> </ol>
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birokrasi yang cukup</li> <li>2. Kewenangan</li> <li>3. Fasilitas yang memadai</li> </ol>
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pengelola</li> </ol>
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP)</li> <li>2. Tanggung jawab Tupoksi</li> </ol>

### 1.9 Argumen Penelitian

Persoalan sampah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Persoalan ini sudah lama dan sudah menjadi persoalan yang di hadapi oleh kota-kota besar. Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah berpotensi memiliki sampah sebanyak 120 ton per hari. Bupati Cilacap Tatto Suwanto Pamuji mengatakan, jumlah potensi sampah ini diketahui dari banyaknya penduduk di daerah tersebut yang mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat dan volume sampah. Kendati demikian persoalan yang terjadi di Kota Cilacap merupakan persoalan yang di hadapi oleh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Namun pemerintah dalam hal itu dinas

lingkungan hidup terus berupaya mencari solusi dalam penanganan persoalan sampah di Kota Cilacap. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Cilacap Pengembangan Program pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang merupakan tahap awal upaya pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah.

Implementasi Program pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*), dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi tanah, air, dan udara. Argumen ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Pada efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan sampah. Mengubah sampah menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) memanfaatkan potensi energi yang terkandung dalam sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Sehingga dengan menerapkan implementasi program pengelolaan sampah dapat diolah menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang memiliki volume lebih kecil dibandingkan sampah awalnya.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong yang dikutip oleh Herdiansyah (2011:18) Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan sebagai metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang teliti.

Metode kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk mengamati perilaku, pandangan ataupun aktivitas dengan cara digambarkan dengan menggunakan sebuah bentuk kata. Struktur deskriptif ini mempunyai sebuah tujuan untuk menerangkan atau menyimpulkan berbagai keadaan, kondisi di lapangan yang menjadi tujuan atau arah penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Pada situasi ini yang diamati adalah Implementasi Program Publik Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (Refuse Derived Fuel) di Kabupaten Cilacap.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat ketika akan diadakannya sebuah penelitian/observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian Sugiyono (2008:119). Penetapan lokasi penelitian adalah langkah yang terpenting saat melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif, hal ini dikarenakan melalui penetapan lokasi dilangsungkannya penelitian, maka objek serta tujuan dilangsungkannya penelitian dapat ikut

ditetapkan. Lokasi dari penelitian dapat dilaksanakan di dua tempat guna mendapatkan data primer sehingga dalam hal ini peneliti memutuskan melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan di TPST RDF Kabupaten Cilacap.

### **1.10.3 Subyek Penelitian**

Subjek Penelitian atau informan ialah seseorang ataupun sekelompok orang yang akan dimintai keterangan terkait sebuah fakta ataupun pendapat pribadi (Moleong :2007). Subjek Penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data Penelitian ini dipilih dari subyek atau informan yang mengerti tentang Implementasi Program Kebijakan Pengelolaan Sampah RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. *Purposive Sampling* ini merupakan teknik sampling yang cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, Dengan menggunakan teknik tersebut maka penelitian adalah untuk mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara khusus oleh peneliti. Selain itu, tujuan dari *Purposive Sampling* adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara jelas karena sampel yang mewakili nilai representatif, sehingga tujuan utama peneliti dapat terpenuhi. Oleh karena itu, subjek penelitian dalam Penelitian ini yakni:

1. Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Pengelola Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Sub Koordinator Pengurangan dan Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
4. Staf Karyawan bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
5. Petugas atau Koordinator Lapangan Pengelolaan Sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang bertugas di TPST RDF (*Refuse Derived Fuel*) Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap.

#### **1.10.4 Jenis Data**

Jenis penelitian ini menggunakan Data kualitatif, sesuai yang di kemukakan oleh Wiratna Sujarweni (2014: 89-94), mengungkapkan bahwa data peneliti terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu informasi yang bukan dalam bentuk angka, melainkan diperoleh melalui dokumen atau data secara lisan maupun tulisan.

#### **1.10.5 Sumber Data**

Sumber data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara. Sumber data yakni suatu informasi tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Suliyanto, 2017) yakni:

- a. Data Primer : Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua pengumpulan data asli. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari dokumen yang diberikan dan wawancara, oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang terlibat pada implementasi program pengolahan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap.
- b. Data Sekunder : Data Sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dalam penanganan pengolahan sampah rdf (*refused derived fuel*). Data Sekunder yang digunakan untuk peneliti yakni data dari web Dinas Lingkungan Hidup, artikel maupun berita tentang Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap.

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data (dalam Sugiyono, 2014:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

a) Observasi

Pengamatan atau pencatatan yang dilakukan terhadap suatu aktivitas yang terlihat dalam suatu perihal di dalam objek penelitian disebut juga dengan observasi (Widoyoko, 2014:46). Di dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengamati, megumpulkan, serta mendeskripsikan data dan menganalisis segala aktivitas pengolahan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap. Seperti bagaimana sistem Implementasi program pengelolaan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Observasi yang dilakukan oleh penulis yakni keterlibatan langsung di lapangan, yaitu dengan ikut serta dalam mengamati hasil observasi atau pengamatan seluruh kegiatan atau program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam mengelola sampah RDF (*Refused Derived Fuel*).

b) Wawancara

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:188) wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dimaksud tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.



Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan TPST RDF Kabupaten Cilacap. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengaduan dari actor pelaksanaan hingga masyarakat.

c) Dokumentasi

Sugiyono (2009) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan. Jenis dokumentasi dalam penelitian ini antara lain : Dokumen-dokumen atau

arsip-arsip terkait dengan Implementasi program pengelolaan sampah berbasis RDF di Kabupaten Cilacap.

#### **1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *interactive model* dari Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:246) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menggerakkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan di verifikasi. Mereduksi berarti merangkum yaitu memilih hal-hal pokok dan penting. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan

tindakan selanjutnya. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik network (jejaringan kerja), dan bagan.

c) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan arah sebab akibat, dan berbagi proposisi. Penarikan kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan faktor yang terkait pada kondisi internal maupun eksternal.

### **1.10.8 Kualitas Data**

Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji tingkat kepercayaan maupun kebenaran dari penelitian yang ditentukan dengan standar yang ada, dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data adalah :

1. Trianggulasi

Ada 3 macam triangulasi, yaitu:

a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara

pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi Sumber pada penelitian ini adalah: Koordinator RDF, Staff karyawan pengelola sampah dan Petugas Lapangan di TPST RDF. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan (kredibilitas) data serta informan terhadap Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.